

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam upaya penanggulangan *stunting* di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati telah memenuhi tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

4.1.1 *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Upaya *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pati mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil yang dicapai. Dialog tatap muka dilakukan melalui pembentukan TPPS yang melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, LSM, dan sektor swasta, dengan dukungan program BAAS. Namun, miskomunikasi antar-OPD sering menjadi penghambat dalam koordinasi lintas sektor. Membangun kepercayaan dilakukan melalui rapat berkala, meskipun komitmen pimpinan, terutama dari tingkat kabupaten hingga desa, masih kurang optimal. Komitmen pada proses diwujudkan dengan pelaksanaan delapan aksi konvergensi yang dipimpin Bappeda dan ditopang oleh regulasi berupa Perbup. Kendati demikian, tidak semua OPD berperan aktif, dan transparansi dalam pengelolaan dana masih menjadi tantangan. Pemahaman bersama terus diupayakan melalui pertemuan rutin, meski perbedaan fokus kerja antar-OPD sering menghambat keseragaman persepsi.

Hasilnya, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati berhasil turun dari 20,7% menjadi 18,3%, dengan pencapaian tingkat desa yang lebih rinci seperti di Desa Metaraman. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dan monitoring yang belum optimal menjadi kendala dalam mendukung keberhasilan program secara menyeluruh.

4.1.2 Faktor penghambat dalam Upaya Penanggulangan Prevalensi Angka *Stunting* di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Proses kolaborasi dalam penanganan *stunting* di Desa Metaraman menghadapi beberapa hambatan yang melibatkan faktor budaya, institusi, dan politik. Faktor budaya menjadi tantangan karena masyarakat masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama dan saran dari anggota keluarga yang kurang memahami pentingnya gizi seimbang, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Di sisi institusi, struktur hierarkis dan pendekatan yang terlalu kaku terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menghambat fleksibilitas kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Namun, dari sisi politik, Pemerintah Kabupaten Pati telah menginisiasi berbagai program inovatif seperti BASUH STUPA dan BERDENTING untuk memberikan intervensi langsung, edukasi, dan layanan kesehatan yang lebih komprehensif bagi anak-anak dan ibu hamil di berbagai desa. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam menanggulangi *stunting*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang belum optimal terkait dengan proses Collaborative Governance dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* dan adanya faktor penghambat proses

kolaborasi dalam upaya penanggulangan prevalensi angka *stunting* di Desa Metaraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Penanganan *stunting* membutuhkan koordinasi rutin lintas OPD dengan pembagian tugas yang jelas, dialog terbuka antara Bapperida dan Sekretaris Daerah, serta penerapan sistem komunikasi dan pelaporan berbasis digital untuk transparansi. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, FGD, dan edukasi langsung, sementara monitoring program disarankan berbasis data menggunakan aplikasi kesehatan. Pelatihan praktis tentang penanganan *stunting* dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efektivitas program.
2. Penanganan *stunting* di Desa Metaraman memerlukan kunjungan rutin tenaga kesehatan sebanyak empat kali dalam sebulan untuk memberikan pendampingan langsung kepada keluarga. Selain itu, pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan kerja sama dan manajemen lintas fungsi perlu dilakukan untuk membantu pemangku kepentingan memahami peran masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. SOP yang ada juga perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel, terutama dalam tugas-tugas yang membutuhkan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.